



**PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR**

**RANCANGAN AKHIR**

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**2024**



**DINAS  
KETENAGAKERJAAN**

# Kata Pengantar

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2024 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2024 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana

strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Untuk tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan untuk mencapai 2 tujuan dan 4 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024, dengan total anggaran belanja sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, Agustus 2024  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MAKASSAR

**NIELMA PALAMBA, SH. M.AP**  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc  
NIP : 19651210 199112 2 006

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>01</b>
1.1 Latar Belakang .....	01
1.2 Landasan Hukum .....	02
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	06
1.4 Sistematika Penulisan .....	06
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024</b> .....	<b>09</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	09
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD .....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024 .....	39
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	49
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>53</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>64</b>

# Daftar Tabel

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 .....	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	28
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 s.d Tahun 2023 .....	34
Tabel 2.5	Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar .....	36
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal Peubahan RKPD Tahun 2024 Kota Makassar .....	41
Tabel 2.7	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Makassar .....	49
Tabel 3.1	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 .....	54
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	55

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 2708/050.13/Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada pasal 343 Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 pada triwulan II dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan permasalahan bidang ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang

terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.23.795.268.470,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.392.105.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.6.051.761.339,- (enam milyar lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 25,02 persen. Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2024 keseluruhan sebesar 61,31 persen atau capaian berkinerja rendah ( $51\% \leq 65\%$ ).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 050.13/176/S.Edar/Bappeda/V/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA\_PD) Tahun 2024 untuk Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72



- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan; dan
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Maksud:

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan:

1. Menyelaraskan Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja (pasal 365 ayat 2);
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ke Perubahan Renja Perangkat Daerah; serta
3. Sebagai pedoman untuk Menyusun KUPA dan PPAS Perubahan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut:

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI RECANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai alasan terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Program dan Kegiatan yang tidak mengalami perubahan serta program dan kegiatan yang mengalami perubahan

### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

# BAB II

## Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketenagakerjaan.

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024, adalah : Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dimana dari 16 (enam belas) usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota

Makassar sebanyak 16 (enam belas) usulan kegiatan yang terakomodir.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.7.701.751.160,- (tujuh milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) atau 31,84 persen.

Rata-rata capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 31,19 persen atau berkinerja sangat rendah

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan dan tidak terbayarnya iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan selama 2 (dua) bulan. Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.II	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	91,92%	90,00%	56,76%	63,06%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	68,25%	90,00%	52,46%	58,29%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 56,76 persen. Dimana dari 74 unit sarana da prasarana aparatur yang tersedia sebanyak 42 unit dalam kondisi baik;

- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50,00 persen dimana dari 12 laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 6 laporan; dan
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 58,29 persen. Dimana dari 61 orang ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 32 orang mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.406.337.920,- (sepuluh milyar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.928.103.090,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,76 persen.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.



Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
- b. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
- d. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.

Faktor Penghambat:

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan RUP terkait metode pemilihan penyedia barang dan jasa;
- b. Tidak keluarnya Surat Penyediaan Dana (SPD) beberapa rincian belanja sehingga tidak dapat dilaksanakan; dan
- c. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan masih dalam proses pencairan keuangan.

Faktor Pendukung:

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan anggaran; dan
- b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Tindak Lanjut:

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

## 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.II	% Capaian
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,33%	96,77%	0,00%	0,00%

Rata-Rata capaian kinerja program sebesar 0,00 persen atau kategori berkinerja sangat rendah. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

- a. Dari target 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0,00 persen atau dengan capaian sebesar 00,00 persen. Masih nihilnya capaian disebabkan kegiatan pada program tersebut berada triwulan III.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.32.570.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 21,85 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro di triwulan III.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- a. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- b. Sosialisasi Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

### 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,65%	1,03%	0,62%	60,19%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,05%	22,00%	20,69%	94,05%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	962,00 Orang	1.190 Orang	200,00 Orang	16,81%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,62 persen, dimana sebanyak 2409 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 387180 orang tenaga kerja keseluruhan;
- Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 20,69 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp. 133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen; dan

- Dari target 1.190 Orang Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebanyak 200 orang.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.203.613.800,- (tiga milyar dua ratus tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.906.048.290,- (sembilan ratus enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 28,28 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Instruktur;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar; dan
- Keterlambatan proses administrasi pelaksanaan kegiatan.

Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

#### 4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target	Tahun 2024	
			Realisasi s/d Tri.II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui	59,04%	65,00%	26,33%	40,51%

Mekanisme Layanan Antar  
Kerja Dalam Wilayah Kota  
Makassar

Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.563 Peluang Kerja	9.555 Peluang Kerja	4777,00	49,99%
---	---------------------------	---------------------------	---------	--------

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 26,33 persen atau sebesar 40,51 persen dimana pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1197 orang dari 4547 orang pencari kerja keseluruhan;
- Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 4777 peluang kerja atau sebesar 49,99 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.389.181.350,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.246.119.400,- (dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 10,30 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal; dan
- Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

## 5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
	Tahun 2023	Target	Realisasi s/d Tri.II	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	31,53%	38,50%	0,00%	0,00%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,21%	3,66%	0,00%	0,00%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	62,96%	79,00%	60,44%	76,51%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 3,66 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun
- Dari target 79 persen kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 60,44 persen atau sebesar 76,51 persen dimana dari 91 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 55 kasus diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.8.039.200.400,- (delapan milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.588.910.380,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 19,76 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Masih terbatasnya PNS pejabat fungsional mediator;

- Untuk pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan verifikasi data sedang dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil; dan
- Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-E.81 berikut:

**TABEL 2.1 (FORMAT T-E.81)**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR**  
**PERIODE PELAKSANAAN : SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang Mengacu pada sasaran RKPd

- 52,50 Persen Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas;
- 22,00 Persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3,66 Persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertanian
- 88,00 Persen Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 81,00 Persen Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Divaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Divaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5	6		7	8	9	10	11	12	13 = 11/8 x 100%		14 = 5 x 11			15 = 13/4 x 100%											
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.				
<b>URUSAN WAJIB</b>																													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																													
02	2.07	01	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen	66.549.824.200	91,92	19.713.767.361	90	10.333.799.664	90	10.406.337.920	10,81	1.865.986.166	56,76	3.062.116.924	-	-	31,84%	7.701.751.160	31,84	42.390.144.632	41,98	Disaker						
			Perentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 Persen	100,00			100				25,00	50,00					56,76	4.928.103.090	63,06	47,36	56,76	24.641.870.451	63,06	37,03				
			Perentase An Perangat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Persen	88,52			90				24,59	52,46					52,46	50,00	50,00	52,46	50,00	58,29	58,29					
02	2.07	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67 Dokumen	1.568.610.628	21	249.000.750	13	272.589.000	12	131.310.300	1	38.300.000	-	-	-	-	1	38.300.000	8,333333	29,17	22	287.300.750	32,84	18,43	Disaker		
02	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	4	116.827.650	2	130.295.000	2	109.159.000	0	38.300.000	0	0	0	0	0	38.300.000	0	35,09	4	155.127.650	33,33	19,60	Disaker	
02	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	49.643.596	2	9.382.000	1	9.651.000	1	5.377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.382.000	40,00	18,90	Disaker	
02	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	46.569.705	2	10.447.000	1	8.984.000	1	3.899.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.447.000	40,00	22,43	Disaker	
02	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	2	9.038.000	1	9.764.000	1	2.429.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.038.000	40,00	20,13	Disaker	
02	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	42.013.201	2	7.990.000	1	8.788.000	1	1.769.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7.990.000	40,00	19,02	Disaker	
02	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	5	97.785.000	4	5.286.300	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	6	89.084.500	24,00	16,44	Disaker	
02	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	4	6.231.600	2	7.322.000	2	3.389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6.231.600	40,00	14,76	Disaker	
02	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240 Dokumen	45.333.869.754	84	13.311.095.128	36	7.275.827.940	12	7.328.002.636	3	1.549.463.597	3	2.626.404.171	-	-	-	6	4.175.867.768	50,00	56,99	90	17.486.962.896	37,50	38,57	Disaker	
02	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	306 Orang/Bulan	43.046.749.849	122	12.517.842.728	61	6.891.107.940	62	6.882.537.436	62	1.438.133.597	0	2.515.074.171				62	3.953.207.768	100,00	57,44	194	16.471.050.496	60,33	38,26	Disaker
02	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	24	466.480.000	12	240.720.000	12	265.320.000	3	66.330.000	3	66.330.000				6	132.660.000	50,00	50,00	30	599.140.000	50,00	44,78	Disaker
02	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	24	288.000.000	12	144.000.000	12	144.145.200	3	36.000.000	3	36.000.000				6	72.000.000	50,00	49,05	30	360.000.000	50,00	48,23	Disaker
02	2.07	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400	0	0	12	36.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000				6	18.000.000	0,00	0,00	18	56.772.400	30,00	28,01	Disaker
02	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 Dokumen	735.931.340	24	247.546.500	12	143.673.200	12	181.681.200	3	28.500.000	2	28.840.200	-	-	-	5	57.340.200	41,67	31,56	29	304.886.700	48,33	41,43	Disaker	
02	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	424.788.769	24	127.193.400	12	83.440.800	12	82.735.200	3	6.000.000	3	6.097.200				6	12.097.200	50,00	14,62	30	139.290.600	50,00	32,79	Disaker
02	2.07	01	2.03	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	311.142.572	24	120.353.100	12	60.232.400	12	98.946.000	3	22.500.000	3	22.743.000				6	45.243.000	50,00	45,72	30	165.996.100	50,00	53,22	Disaker
02	2.07	01	2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Dokumen	1.644.290.162	24	333.810.914	12	204.488.400	12	332.946.000	3	67.613.192	2	22.743.000				-	5	90.356.192	41,67	27,14	29	423.867.106	48,33	26,78	Disaker
02	2.07	01	2.06	02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	548 Paket	427.458.285	218	136.670.000	110	75.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	218	136.670.000	39,78	31,97	Disaker			
02	2.07	01	2.06	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	312.695.296	24	119.904.800	12	60.488.400	12	98.946.000	3	22.500.000	2	22.743.000				5	45.243.000	41,67	45,72	29	165.147.600	48,33	52,81	Disaker
02	2.07	01	2.06	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	780.000.000	12	76.936.314	7	69.000.000	12	234.000.000	5	45.113.192	3	0				8	45.113.192	66,67	19,28	20	122.049.506	28,99	15,65	Disaker
02	2.07	01	2.06	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	124.136.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Disaker	
02	2.07	01	2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Jenis	5.775.451.212	14	1.810.411.075	7	998.941.840	7	902.382.900	0	41.995.020	1	163.932.088				1	205.827.108	14,29	22,81	15	2.016.238.183	42,86	34,91	Disaker
02	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	63.252.683	2	21.010.500	1	10.560.100	1	13.312.800	0	0	0	6.648.000				-	6.648.000	0,00	49,94	2	27.658.500	40,00	43,73	Disaker
02	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	25 Paket	432.256.379	9	135.548.700	4	68.612.200	5	75.977.200	0	0	0	16.730.000				-	16.730.000	0,00	22,02	9	152.278.700	36,00	35,23	Disaker
02	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.842	5	138.217.200	2	56.204.540	2	76.827.300	1	31.110.000	1	31.110.000				1	31.110.000	50,00	40,09	6	169.327.200	40,00	43,21	Disaker
02	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	186.007.458	4	57.050.000	1	19.465.000	2	22.665.600	0	0	0	0				-	-	0,00	0,00	4	57.050.000	40,00	30,67	Disaker
02	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100.473.750	24	32.650.000	12	19.500.000	12	26.100.000	3	2.880.000	2	4.560.000				5	7.440.000	41,67	28,51	29	40.000.000	48,33	39,81	Disaker
02	2.07	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.956.315.000	24	938.724.675	66	420.000.000	12	483.500.000	3	33.615.020	2	86.284.088				5	119.899.108	41,67	24,80	29	1.058.823.763	48,33	35,81	Disaker
02	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	24	487.300.000	12	404.400.000	12	204.000.000	3	5.400.000	2	18.600.000				5	24.000.000	41,67	11,76	29	511.300.000	48,33	31,08	Disaker

1.524.201







Untuk capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2024 (merupakan tahun ketiga periode RENSTRA) rata-rata capaian kinerja sebesar 58,51 persen hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang indikator kinerja program secara langsung belum waktunya dilaksanakan.

Adapun perkiraan realisasi capaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tingkat capaian realisasi target kinerja sebesar 83,42 persen;
2. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 58,31 persen;
3. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 3 program, yang telah memenuhi target sebanyak 2 program dan melebihi target sebanyak 0 program;
4. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 19 kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan; serta
5. Realisasi sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 59 sub kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 sub kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-C.29 berikut

**TABEL 2.2 (FORMAT T-C.29)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
<b>URUSAN WAJIB</b>																						
02	2.07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>		<b>100.978.427.000</b>		<b>17.696.143.073</b>		<b>18.266.855.572</b>		<b>16.992.250.299</b>		<b>16,83%</b>		<b>24.187.373.870</b>		<b>58.875.767.242</b>		<b>58,31</b>			
02	2.07	01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>90 Persen</b>	<b>66.549.824.200</b>	<b>91,92</b>	<b>9.964.018.995</b>	<b>90,00</b>	<b>10.714.718.462</b>	<b>91,92</b>	<b>9.749.748.366</b>	<b>102,13</b>	<b>14,65</b>	<b>90</b>	<b>10.406.337.920</b>	<b>90</b>	<b>30.120.105.281</b>	<b>100,00</b>	<b>45,26</b>		
				<b>Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100,00</b>			
				<b>Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</b>	<b>90 Persen</b>		<b>88,52</b>		<b>90,00</b>		<b>88,52</b>		<b>98,36</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>100,00</b>			
02	2.07	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>67 Dokumen</b>	<b>1.558.610.628</b>	<b>13</b>	<b>182.407.750</b>	<b>8</b>	<b>70.640.000</b>	<b>8</b>	<b>66.593.000</b>	<b>11,94</b>	<b>4,27</b>	<b>12</b>	<b>131.310.300</b>	<b>33,00</b>	<b>380.311.050</b>	<b>49,25</b>	<b>24,40</b>	
02	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	2	57.827.650	2	61.736.000	2	59.000.000	16,67	7,46	2	109.159.000	6,00	225.986.650	50,00	28,56
02	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	49.643.596	1	7.510.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20,00	3,77	1	5.377.000	3,00	14.759.000	60,00	29,73
02	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	46.569.705	1	8.575.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20,00	4,02	1	3.899.400	3,00	14.346.400	60,00	30,81
02	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	1	6.808.000	1	2.636.000	1	2.230.000	20,00	4,97	1	2.429.800	3,00	11.467.800	60,00	25,55
02	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	42.013.201	1	6.560.000	1	1.724.000	1	1.430.000	20,00	3,40	1	1.769.800	3,00	9.759.800	60,00	23,23
02	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	-	-	-	-	-	-	4	5.286.300	9,00	94.370.800	36,00	17,41
02	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	2	6.042.600	2	192.000	2	189.000	20,00	0,45	2	3.389.000	6,00	9.620.600	60,00	22,78
02	2.07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>240 Dokumen</b>	<b>45.333.869.754</b>	<b>48</b>	<b>6.579.946.435</b>	<b>36</b>	<b>7.367.917.235</b>	<b>36</b>	<b>6.731.148.693</b>	<b>15,00</b>	<b>14,85</b>	<b>12</b>	<b>7.328.002.636</b>	<b>96,00</b>	<b>20.639.097.764</b>	<b>40,00</b>	<b>45,53</b>
02	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305 Orang/Bulan	43.046.749.849	61	6.167.814.035	61	6.983.197.235	61	6.350.028.693	20,00	14,75	62	6.882.537.436	184,00	19.400.380.164	60,33	45,07
02	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	12	229.360.000	12	240.720.000	12	237.120.000	20,00	17,72	12	265.320.000	36,00	731.800.000	60,00	54,69
02	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	20,00	19,29	12	144.145.200	36,00	432.145.200	60,00	57,89
02	2.07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400	0	0	-	-	-	-	12	36.000.000	24,00	74.772.400	40,00	36,89
02	2.07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>60 Dokumen</b>	<b>735.931.340</b>	<b>12</b>	<b>124.111.680</b>	<b>12</b>	<b>142.938.800</b>	<b>12</b>	<b>123.434.820</b>	<b>20,00</b>	<b>16,77</b>	<b>12</b>	<b>181.681.200</b>	<b>36,00</b>	<b>429.227.700</b>	<b>60,00</b>	<b>58,32</b>
02	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	424.788.769	12	63.616.752	12	82.951.200	12	63.576.648	20,00	14,97	12	82.735.200	36,00	209.928.600	60,00	49,42
02	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	311.142.572	12	60.494.928	12	59.987.600	12	59.858.172	20,00	19,24	12	98.946.000	36,00	219.299.100	60,00	70,48
02	2.07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60 Dokumen</b>	<b>1.644.290.162</b>	<b>12</b>	<b>142.252.428</b>	<b>12</b>	<b>210.243.600</b>	<b>12</b>	<b>191.258.486</b>	<b>20,00</b>	<b>11,63</b>	<b>12</b>	<b>332.946.000</b>	<b>36,00</b>	<b>666.456.914</b>	<b>60,00</b>	<b>40,53</b>
02	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	548 Paket	427.458.285	108	63.070.000	110	75.000.000	110	73.600.000	20,07	17,22	-	-	218,00	136.670.000	39,78	31,97
02	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	312.695.296	12	60.550.428	12	60.243.600	12	59.354.172	20,00	18,98	12	98.946.000	36,00	218.850.600	60,00	69,99
02	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	780.000.000	2	18.632.000	10	75.000.000	10	58.304.314	14,49	7,47	10	234.000.000	22,00	310.936.314	31,88	39,86
02	2.07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	124.136.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
02	2.07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>35 Jenis</b>	<b>5.775.451.212</b>	<b>7</b>	<b>702.242.712</b>	<b>7</b>	<b>1.147.232.780</b>	<b>7</b>	<b>1.108.168.365</b>	<b>20,00</b>	<b>19,19</b>	<b>7</b>	<b>902.382.900</b>	<b>21,00</b>	<b>2.712.793.975</b>	<b>60,00</b>	<b>46,97</b>
02	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63.252.683	1	10.415.000	1	12.687.100	1	10.595.500	20,00	16,75	1	13.312.800	3,00	34.323.300	60,00	54,26
02	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	432.256.379	4	68.242.000	5	78.695.300	5	67.306.700	20,00	15,57	5	75.977.200	14,00	211.525.900	56,00	48,94

02	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.942	2	67.138.100	3	77.430.380	3	71.079.100	20,00	18,14	2	76.827.300	7,00	215.044.500	46,67	54,87
02	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 Paket	186.007.458	2	22.330.000	2	39.620.000	2	34.720.000	20,00	18,67	2	22.665.600	6,00	79.715.600	60,00	42,86
02	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100.473.750	12	16.320.000	12	19.500.000	12	16.240.000	20,00	16,16	12	26.100.000	36,00	58.660.000	60,00	58,38
02	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.956.315.000	12	469.397.612	12	474.500.000	12	469.327.063	20,00	15,88	12	483.500.000	36,00	1.422.224.675	60,00	48,11
02	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	12	48.400.000	12	444.800.000	12	438.900.000	20,00	26,68	12	204.000.000	36,00	691.300.000	60,00	42,02
02	2.07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>358 Unit</b>	<b>4.085.244.492</b>	<b>120</b>	<b>1.398.284.901</b>	<b>64</b>	<b>354.249.750</b>	<b>64</b>	<b>298.477.350</b>	<b>17,88</b>	<b>7,31</b>	<b>25</b>	<b>356.233.000</b>	<b>209,00</b>	<b>2.052.995.251</b>	<b>58,38</b>	<b>50,25</b>
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.270.400.000	49	457.774.591	29	178.872.000	29	171.550.000	19,33	13,50	16	226.000.000	94,00	855.324.591	62,67	67,33
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.214.844.492	69	848.941.750	35	175.377.750	35	126.927.350	17,50	5,73	9	130.233.000	113,00	1.106.102.100	56,50	49,94
02	2.07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit	600.000.000	2	91.568.560	0	-	0	-	-	-	0	0	91.568.560	25,00	15,28	
02	2.07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180 Laporan</b>	<b>4.004.302.422</b>	<b>72</b>	<b>453.986.009</b>	<b>36</b>	<b>751.591.447</b>	<b>36</b>	<b>665.711.254</b>	<b>20,00</b>	<b>16,62</b>	<b>36</b>	<b>732.942.884</b>	<b>144,00</b>	<b>1.852.640.147</b>	<b>80,00</b>	<b>46,27</b>
02	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	938.622.398	12	178.989.384	12	200.172.000	12	191.438.105	20,00	20,40	12	158.313.600	36,00	528.741.089	60,00	56,33
02	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.713.496.365	12	246.874.625	12	252.963.947	12	199.901.503	20,00	11,67	12	337.331.684	36,00	784.107.812	60,00	45,76
02	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.352.183.680	12	28.122.000	12	298.455.500	12	274.371.646	20,00	20,29	12	237.297.600	36,00	539.791.246	60,00	39,92
02	2.07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>243 Unit</b>	<b>3.412.124.190</b>	<b>46</b>	<b>380.787.080</b>	<b>63</b>	<b>669.904.850</b>	<b>63</b>	<b>564.956.400</b>	<b>25,93</b>	<b>16,56</b>	<b>74</b>	<b>440.839.000</b>	<b>183,00</b>	<b>1.386.582.480</b>	<b>75,31</b>	<b>40,64</b>
02	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	249.299.292	1	32.024.600	1	47.411.250	1	43.034.100	20,00	17,26	1	44.380.000	3,00	119.438.700	60,00	47,91
02	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	1.724.233.340	15	126.690.150	15	286.142.600	15	210.196.700	18,75	12,19	17	254.173.000	47,00	591.059.850	58,75	34,28
02	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	237.669.540	29	34.423.100	46	46.050.000	46	41.447.500	30,67	17,44	55	36.950.000	130,00	112.820.600	86,67	47,47
02	2.07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
02	2.07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.050.922.019	1	187.649.230	1	290.301.000	1	270.278.100	20,00	25,72	1	105.336.000	3,00	563.263.330	60,00	53,60
02	2.07	02			<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>96,77 Persen</b>	<b>636.233.000</b>	<b>93,33</b>	<b>224.904.165</b>	<b>93,56</b>	<b>108.599.000</b>	<b>93,33</b>	<b>85.322.540</b>	<b>96,45</b>	<b>13,41</b>	<b>96,77</b>	<b>149.040.400</b>	<b>96,77</b>	<b>459.267.105</b>	<b>100,00</b>	<b>72,19</b>
02	2.07	02	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>636.233.000</b>	<b>1</b>	<b>224.904.165</b>	<b>1</b>	<b>108.599.000</b>	<b>1</b>	<b>85.322.540</b>	<b>20,00</b>	<b>13,41</b>	<b>1</b>	<b>149.040.400</b>	<b>3,00</b>	<b>459.267.105</b>	<b>60,00</b>	<b>72,19</b>
02	2.07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	471.897.366	1	125.714.965	1	41.857.000	1	24.460.540	20,00	5,18	1	111.507.200	3,00	261.682.705	60,00	55,45
02	2.07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	500 Perusahaan	164.335.634	150	99.189.200	50	66.742.000	50	60.862.000	10,00	37,04	50	37.533.200	250,00	197.584.400	50,00	120,23
02	2.07	03			<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>1,20 Persen</b>	<b>20.134.599.650</b>	<b>0,53</b>	<b>3.307.805.025</b>	<b>0,70</b>	<b>3.875.738.700</b>	<b>0,65</b>	<b>3.773.790.580</b>	<b>53,76</b>	<b>18,74</b>	<b>1,03</b>	<b>3.203.613.800</b>	<b>1,03</b>	<b>10.285.209.405</b>	<b>85,83</b>	<b>51,08</b>
						<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>23,00 Persen</b>	<b>20,05</b>	<b>21,50</b>			<b>20,05</b>	<b>87,17</b>	<b>22,00</b>			<b>22,00</b>	<b>95,65</b>				
						<b>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan</b>	<b>5.690 Orang</b>	<b>1.122</b>	<b>1.000</b>			<b>962</b>	<b>16,91</b>	<b>1.190</b>	<b>3.274,00</b>	<b>57,54</b>						
02	2.07	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023</b>	<b>2.800 Orang</b>	<b>11.068.673.234</b>	<b>532</b>	<b>1.362.066.799</b>	<b>336</b>	<b>1.841.958.500</b>	<b>336</b>	<b>1.781.472.348</b>	<b>12,00</b>	<b>16,09</b>	<b>240</b>	<b>1.132.128.300</b>	<b>1.108,00</b>	<b>4.275.667.447</b>	<b>39,57</b>	<b>38,63</b>
02	2.07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	10.123.339.130	532	1.194.177.349	336	1.817.743.000	336	1.758.391.723	12,00	17,37	240	1.123.615.300	1.108,00	4.076.184.372	39,57	40,27
02	2.07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	750 Lembaga	945.334.104	180	167.889.450	50	24.215.500	50	23.080.625	6,67	2,44	50	8.513.000	280,00	199.483.075	37,33	21,10
02	2.07	03	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>400 Lembaga</b>	<b>492.061.325</b>	<b>80</b>	<b>111.718.792</b>	<b>80</b>	<b>129.546.000</b>	<b>80</b>	<b>123.260.000</b>	<b>20,00</b>	<b>25,05</b>	<b>80</b>	<b>34.813.400</b>	<b>240,00</b>	<b>269.792.192</b>	<b>60,00</b>	<b>54,83</b>
02	2.07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	129.546.000	80	123.260.000	20,00	25,05	80	34.813.400	240,00	269.792.192	60,00	54,83
02	2.07	03	2.03		<b>Peningkatan dan Pendafaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>	<b>120 Perizinan</b>	<b>1.265.515.343</b>	<b>12</b>	<b>142.671.834</b>	<b>24</b>	<b>198.947.600</b>	<b>24</b>	<b>182.020.992</b>	<b>20</b>	<b>14,38</b>	<b>12</b>	<b>214.774.300</b>	<b>48,00</b>	<b>539.467.126</b>	<b>40,00</b>	<b>42,63</b>
02	2.07	03	2.03	01	Peningkatan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	12	142.671.834	24	198.947.600	24	182.020.992	20	14,38	12	214.774.300	48,00	539.467.126	40,00	42,63
02	2.07	03	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>1.250 Perusahaan</b>	<b>2.207.533.361</b>	<b>250</b>	<b>451.065.800</b>	<b>300</b>	<b>511.200.000</b>	<b>300</b>	<b>503.748.240</b>	<b>24,00</b>	<b>22,82</b>	<b>90</b>	<b>399.285.300</b>	<b>640,00</b>	<b>1.354.099.340</b>	<b>51,20</b>	<b>61,34</b>
02	2.07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	300	511.200.000	300	503.748.240	24,00	22,82	90	399.285.300	640,00	1.354.099.340	51,20	61,34
02	2.07	03	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5.100.816.387</b>	<b>1</b>	<b>1.240.281.800</b>	<b>1</b>	<b>1.194.086.600</b>	<b>1</b>	<b>1.183.289.000</b>	<b>20,00</b>	<b>23,20</b>	<b>1</b>	<b>1.422.612.500</b>	<b>3,00</b>	<b>3.846.183.300</b>	<b>60,00</b>	<b>75,40</b>
02	2.07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	1.194.086.600	1	1.183.289.000	20,00	23,20	1	1.422.612.500	3,00	3.846.183.300	60,00	75,40

02	2.07	04		<b>Program Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar</b>	<b>75,00 Persen</b>	<b>9.042.923.150</b>	<b>53,46</b>	<b>3.050.042.646</b>	<b>60,00</b>	<b>2.718.381.410</b>	<b>59,04</b>	<b>2.597.212.652</b>	<b>78,72</b>	<b>28,72</b>	<b>65,00</b>	<b>2.389.181.350</b>	<b>65,00</b>	<b>8.036.436.648</b>	<b>86,67</b>	<b>88,87</b>	
					<b>Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru</b>	<b>46.240 Peluang Kerja</b>		<b>8.483</b>		<b>8.640</b>		<b>8.583</b>		<b>18,52</b>		<b>9.555</b>		<b>26.601</b>		<b>57,53</b>		
02	2.07	04	2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan, Dibudayakan dan Fasilitas Layanan</b>	<b>15.915 Orang</b>	<b>4.658.055.590</b>	<b>3.884</b>	<b>1.985.005.722</b>	<b>3.948</b>	<b>2.078.249.310</b>	<b>3.905</b>	<b>1.997.468.808</b>	<b>24,54</b>	<b>42,88</b>	<b>3.713</b>	<b>1.636.284.150</b>	<b>#####</b>	<b>5.618.758.680</b>	<b>72,15</b>	<b>120,62</b>	
02	2.07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	120 Orang	140.000.000	0	0	30	1.371.000	0	794000	0	0,5671429	-	-	-	794.000	-	0,57
02	2.07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	14.000 Orang	1.581.271.686	3.400	646.716.626	3.500	95.914.300	3.457	86.543.848	24,69	5,47	3500	144.946.400	#####	878.206.874	73,98	55,54
02	2.07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	211.723.027	100	40.762.940	100	25.269.000	100	22.771.000	20,00	10,76	0	-	200,00	63.533.940	40,00	30,01
02	2.07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	500 Orang	579.577.120	115	142.566.676	100	69.828.200	100	63.246.460	20,00	10,91	30	235.120.000	245,00	440.933.136	49,00	76,08
02	2.07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	915 Orang	2.145.483.756	249	1.154.959.480	248	1.885.866.810	248	1.824.113.500	27,10	85,02	183	1.256.217.750	680,00	4.235.290.730	74,32	197,40
02	2.07	04	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>30 Lembaga</b>	<b>310.550.466</b>	<b>6</b>	<b>56.786.096</b>	<b>6</b>	<b>69.875.400</b>	<b>6</b>	<b>65.336.448</b>	<b>20,00</b>	<b>21,04</b>	<b>6</b>	<b>41.499.200</b>	<b>18,00</b>	<b>163.621.744</b>	<b>60,00</b>	<b>52,69</b>
02	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	227.504.964	6	42.422.888	6	42.290.400	6	41.753.448	20,00	18,35	6	41.499.200	18,00	125.675.536	60,00	55,24
02	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502	4	14.363.208	4	27.585.000	4	23.583.000	20,00	28,40	0	-	8,00	37.946.208	40,00	45,69
02	2.07	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>40.000 Orang</b>	<b>3.031.203.308</b>	<b>7,361</b>	<b>870.380.604</b>	<b>4.000</b>	<b>453.579.800</b>	<b>3.796</b>	<b>431.628.896</b>	<b>9,49</b>	<b>14,24</b>	<b>4.000</b>	<b>489.322.000</b>	<b>#####</b>	<b>1.791.331.500</b>	<b>37,89</b>	<b>59,10</b>
02	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	316.496.699	12	47.681.252	12	42.604.400	12	41.917.448	20,00	13,24	12	60.328.000	36,00	149.926.700	60,00	47,37
02	2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	7,361	217.646.552	4.000	45.946.400	3.796	45.733.448	9,49	4,57	4.000	43.766.800	#####	307.146.800	37,89	30,69
02	2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5.000 Orang	1.714.006.714	1,704	605.052.800	1.000	365.029.000	877	343.978.000	17,54	20,07	500	385.227.200	3.081,00	1.334.258.000	61,62	77,84
02	2.07	04	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>1.200 Orang</b>	<b>1.043.113.786</b>	<b>140</b>	<b>137.870.224</b>	<b>70</b>	<b>116.676.900</b>	<b>140</b>	<b>102.778.500</b>	<b>11,67</b>	<b>9,85</b>	<b>40</b>	<b>222.076.000</b>	<b>320,00</b>	<b>462.724.724</b>	<b>26,67</b>	<b>44,36</b>
02	2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	800 Orang	559.970.481	100	37.782.940	50	25.310.000	50	23.107.500	6,25	4,13	0	-	150,00	60.890.440	18,75	10,87
02	2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	483.143.304	40	100.087.284	20	91.366.900	20	79.671.000	5,00	16,49	40	222.076.000	100,00	401.834.284	25,00	83,17
02	2.07	05			<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>51,01 Persen</b>	<b>4.614.847.000</b>	<b>28,62</b>	<b>1.149.372.242</b>	<b>33,69</b>	<b>849.418.000</b>	<b>31,53</b>	<b>786.176.161</b>	<b>61,81</b>	<b>17,04</b>	<b>38,50</b>	<b>8.039.200.400</b>	<b>38,50</b>	<b>9.974.748.803</b>	<b>75,48</b>	<b>216,14</b>
					<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Per tahun</b>	<b>2,50 Persen</b>		<b>4,67</b>		<b>4,14</b>		<b>4,21</b>		<b>98,33</b>		<b>3,66</b>		<b>3,66</b>		<b>53,60</b>		
					<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>89,00 Persen</b>		<b>61,38</b>		<b>74,00</b>		<b>62,62</b>		<b>70,36</b>		<b>79,00</b>		<b>79,00</b>		<b>88,76</b>		
02	2.07	05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>525 Perusahaan</b>	<b>1.332.331.879</b>	<b>113</b>	<b>652.792.620</b>	<b>105</b>	<b>50.622.100</b>	<b>118</b>	<b>44.965.369</b>	<b>22,48</b>	<b>3,37</b>	<b>105</b>	<b>51.223.300</b>	<b>336,00</b>	<b>648.981.289</b>	<b>64,00</b>	<b>48,71</b>
02	2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	109	54.853.000	100	1.708.000	112	1.522.000	22,40	0,54	100	1.024.800	321,00	57.399.800	64,20	20,27
02	2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	4	52.380.400	5	1.280.000	6	1.154.000	24,00	0,86	5	868.700	15,00	54.403.100	60,00	40,63
02	2.07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315	12	445.559.220	12	47.634.100	12	42.289.369	20,00	4,62	12	49.329.800	36,00	537.178.389	60,00	58,69

02	2.07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	249	696.579.622	260	798.795.900	138	741.210.792	11,04	22,58	260	7.987.977.100	647,00	9.325.767.514	51,76	284,10	
02	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250 Perkara	622.236.026	52	180.230.800	60	99.582.000	41	97.327.000	16,40	15,64	60	77.126.300	153,00	354.684.100	61,20	57,00
02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1.000 Perkara	1.087.010.870	197	133.957.052	200	173.665.600	97	169.343.792	9,70	15,58	200	198.663.600	494,00	501.964.444	49,40	46,18
02	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909		28.538.700	12	16.766.000	9	16.260.000	15,00	9,77	12	9.861.200	21,00	54.659.900	35,00	32,85
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	3	188.873.170	2	162.630.800	2	161.490.000	3,33	15,07	2	250.299.300	7,00	600.662.470	11,67	56,04
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	150	64.979.900	100	346.151.500	100	296.790.000	26,67	88,59	35.782	7.452.026.700	#####	7.813.796.600	9.608,53	2.332,25

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja;
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

Untuk bidang urusan tenaga kerja termasuk urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel sesuai format T-C.30 berikut:





**Tabel 2.3 (Tabel T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan**  
**Kota Makassar Sampai Dengan Tahun 2023**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK Tahun 2026	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	96,77	67,35	93,55	93,55	96,77	67,35	93,33	93,33	96,77	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	1,20	0,41	0,58	0,70	1,03	0,41	0,53	0,65	1,03	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	23,00	20,05	21,00	21,50	22,00	20,05	20,69	20,05	22,00	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	51,01	28,62	29,84	33,69	38,50	28,62	30,75	31,53	38,50	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	-	75,00		55,00	60,00	65,00		58,32	59,04	65,00	

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 93,33 persen dari target 93,55 persen kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja atau dengan capaian sebesar 99,77 persen. Dimana dari 30 jumlah kegiatan keseluruhan berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,65 persen dari target 0,70 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi atau dengan capaian sebesar 92,17 persen. Dimana dari 387.180 jiwa tenaga kerja sebanyak 24.98 jiwa tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 20,65 persen dari target 21,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja atau dengan capaian sebesar 93,26 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 96,25 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terhadap jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 31,53 persen dari target 33,69 persen Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak atau dengan capaian sebesar 93,58 persen. Dimana dari 3.194 perusahaan yang wajib menerapkan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.007 telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (terpenuhi 4 unsur)

#### 5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan terhadap jumlah mencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 59,04 persen dari target 60,00 persen Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota atau dengan capaian sebesar 98,40 persen. Dimana dari 5.315 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.138 orang.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan**

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang

mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan pengangguran, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tahun 2023 sebanyak 1.110.014 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 16,00 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk

dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 kota Makassar memiliki 651.832 jiwa angkatan kerja, berkurang sebanyak minus 77.803 jiwa (minus 10,66 persen) dibandingkan tahun 2022. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor-sektor ekonomi produktif tidak mampu

menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2023, sebanyak 582.708 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan berkurang sebanyak minus 60.660 jiwa (minus 9,43 persen) dibandingkan tahun 2022, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 69.124 jiwa, berkurang sebanyak minus 17.143 jiwa (minus 19,87 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar menurun dari 11,82 persen di tahun 2022, menjadi 10,60 persen di tahun 2023. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar**  
**Tahun 2019–2023**

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.144.563	1.199.282	1.215.200	1.230.996	1.110.014
Angkatan Kerja		661.226	696.158	725.529	729.635	651.832
- Bekerja		592.517	585.325	629.933	643.368	582.708
- Penganggur		68.709	110.833	95.596	86.267	69.124
Bukan Angkatan Kerja		483.337	503.124	489.671	501.361	458.182
- Sekolah		155.016	156.172	130.671	151.801	458.182
- Mengurus Rumah Tangga		267.847		267.390	280.306	
- Lainnya		60.474	280.399	91.610	69.254	
TPT		10,39%	15,92%	13,18%	11,82%	10,60%
TPAK		57,77%	58,05%	59,70%	59,27%	58,72%

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sector industri pengolahan, serta sector konstruksi. Tahun 2023, ketiga sector ini masing-masing berkontribusi 19,67 persen, 18,01 persen, dan 16,73 persen terhadap pembentukan nilai

tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sektor industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sektor ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2023, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2023, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan.



Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis ini dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunitites and Threats) dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Berikut hasil dari analisis:

**Tabel 2.5**  
**Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar**

## **S**trength

- Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mendukung;
- Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun;
- Tersedia sistem Informasi Pasar Kerja; dan
- Terbentuknya Forum HRD, Bursa Kerja Khusus (BKK), UP3, Dewan Tripartit, Dewan Pengupahan, LPK Binaan

## **W**eaknesses

- Kurangnya Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan layanan yang diberikan (jumlah perusahaan di Kota Makassar, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja);
- Belum tersedianya database Ketenagakerjaan yang realtime;
- Keterbatasan anggaran; dan
- Masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan kegiatan lintas sektoral.

## Opportunities

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar yang tinggi;
- Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan dan Kota Jasa;
- Jumlah Angkatan Kerja usia Produktif yang tinggi; dan
- Kerjasama sama dengan ADB dalam Program Jobstrat, BLKI Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan asosiasi pengusaha dalam pemagangan, Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam Pemagangan Luar Negeri (Jepang).

## Threats

- Bonus demografi apabila tidak dapat dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja atau tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akibat kurangnya SDM Tenaga Kerja;
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tidak diiringi oleh elastisitas penyerapan kesempatan kerja;;
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk wajib lapor Ketenagakerjaan;
- Investasi di Kota Makassar masih merupakan padat modal bukan padat karya;
- Urbanisasi yang tidak diikuti oleh SDM yang siap bersaing; dan
- Masih tingginya Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Berdasarkan analisa di atas, berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021–2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Dari hasil analisis SWOT tersebut juga kemudian dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut:

### 1. Strength and Opportunities (SO)

Memanfaatkan Informasi lowongan kerja secara akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan daya tarik para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun, kerjasama sama dengan stakeholder dan keterlibatan dunia pendidikan serta dunia usaha dalam menciptakan tenaga kerja trampil yang dapat berdaya saing dalam penyerapan kesempatan kerja di Kota Makassar.

### 2. Strength and Threats (ST)

Memberikan pemahaman dan meningkatkan pemantauan pada perusahaan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk dapat memberikan kesadaran wajib lapor. Meningkatkan informasi lowongan kerja yang akan memberikan minat atau kepercayaan kepada pencari kerja. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

### 3. Weaknesses and Opportunities (WO)

Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang terampil pada setiap bidang dan membuat aplikasi database Ketenagakerjaan yang realtime (SARRING) untuk memperlancar proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan memudahkan pencari kerja dan penyedia kerja dapat berinteraksi secara langsung secara online.

### 4. Weaknesses and Threats (WT)

Menambah jumlah pejabat fungsional Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Ketenagakerjaan. Menyusun regulasi untuk lebih memperketat dalam pengawasan wajib lapor Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal Perubahan RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan Perubahan RENJA SKPD.

Adapun rancangan awal usulan Perubahan RENJA tahun 2024 sebesar Rp.24.618.127.570,- (dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah. Setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan

analisis kebutuhan pada rancangan akhir usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.23.530.012.761,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel format Formulir T-C.31 berikut:

**TABEL 2.6 (FORMAT T-C.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PEUBAHAN RKPD TAHUN 2024**  
**KOTA MAKASSAR**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
02	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB						
02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					24.618.127.570	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					23.530.012.761
02	2.07	01				11.456.197.920					11.420.696.861	
02	2.07	01										
02	2.07	01	2.01			70.870.300				71.310.300		
02	2.07	01	2.01	0001		49.159.000				49.159.000		
02	2.07	01	2.01	02		5.237.000				5.377.000		
02	2.07	01	2.01	03		3.699.400				3.899.400		
02	2.07	01	2.01	04		2.329.800				2.429.800		
02	2.07	01	2.01	05		1.769.800				1.769.800		
02	2.07	01	2.01	06		5.286.300				5.286.300		

02	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.389.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.389.000	
02	2.07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>8.492.302.636</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>8.560.610.161</b>	
02	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	8.046.837.436	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	8.115.144.961	
02	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265.320.000	
02	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.145.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.145.200	
02	2.07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	36.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	36.000.000	
02	2.07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>133.681.200</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>126.524.400</b>	
02	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	34.735.200	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	27.578.400	
02	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	98.946.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	98.946.000	
02	2.07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>332.946.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>332.946.000</b>	
02	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	
02	2.07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	98.946.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	98.946.000	
02	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	234.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	234.000.000	
02	2.07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	

02	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Adminitras Umum yang Tersedia	7 Jenis	746.382.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Adminitras Umum yang Tersedia	7 Jenis	746.382.900	
02	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.312.800	
02	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.977.200	
02	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.827.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.827.300	
02	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.665.600	
02	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000	
02	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	483.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	483.500.000	
02	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	48.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	48.000.000	
02	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 Unit	356.233.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 Unit	356.245.000	
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	226.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	200.000.000	
02	2.07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	130.233.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	156.245.000	
02	2.07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	
02	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	882.942.884	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	792.054.500	
02	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	158.313.600	
02	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	337.331.684	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.443.300	
02	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.297.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	337.297.600	



02	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	63 Unit	440.839.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	63 Unit	434.623.600
02	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000
02	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	254.173.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	247.957.600
02	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	36.950.000
02	2.07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0
02	2.07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	105.336.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	105.336.000
02	2.07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,55 Persen	149.040.400	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,55 Persen	149.040.400
02	2.07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	149.040.400	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	149.040.400
02	2.07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	111.507.200
02	2.07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	37.533.200	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	37.533.200
02	2.07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,70 Persen	3.203.613.800	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,70 PERSEN	3.152.283.800
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,50 Persen	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				21,50 PERSEN		
						Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.000 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan				1.000 ORANG		
02	2.07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.132.128.300	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.084.128.300
02	2.07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.123.615.300	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	564 Orang	1.075.615.300

02	2.07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	50 Lembaga	8.513.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	50 Lembaga	8.513.000	
02	2.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	
02	2.07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	34.813.400	
02	2.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	
02	2.07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	214.774.300	
02	2.07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	
02	2.07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	320 Perusahaan	399.285.300	
02	2.07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.422.612.500	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.419.282.500	
02	2.07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.422.612.500	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.419.282.500	
02	2.07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,00 Persen	2.588.781.350	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,00 Persen	1.706.286.600	
						Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.640 Peluang Kerja					Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.640 Peluang Kerja		
02	2.07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.909 Orang	1.835.884.150	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	3.909 Orang	1.338.616.600	

02	2.07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	-	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	-
02	2.07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang	144.946.400	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3500 Orang	142.778.400
02	2.07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	-	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	-
02	2.07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	235.120.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	205.247.600
02	2.07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	209 Orang	1.455.817.750	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	209 Orang	990.590.600
02	2.07	04	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>41.499.200</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>41.499.200</b>
02	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	41.499.200
02	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	-	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	-
02	2.07	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>4.000 Orang</b>	<b>489.322.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>4.000 Orang</b>	<b>104.094.800</b>
02	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	60.328.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	60.328.000
02	2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	43.766.800	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.000 Orang	43.766.800
02	2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000 Orang	385.227.200	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	- Orang	-
02	2.07	04	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>120 Orang</b>	<b>222.076.000</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>120 Orang</b>	<b>222.076.000</b>
02	2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	-

02	2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	222.076.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	222.076.000	
02	2.07	05			<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>33,69 Persen</b>	<b>7.220.494.100</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>33,69 Persen</b>	<b>7.101.705.100</b>	
							<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun</b>	<b>4,14 Persen</b>				<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun</b>	<b>4,14 Persen</b>		
							<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>74,00 Persen</b>				<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>74,00 Persen</b>		
02	2.07	05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>105 Perusahaan</b>	<b>51.223.300</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>105 Perusahaan</b>	<b>47.893.300</b>	
02	2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.024.800	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	1.024.800	
02	2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	868.700	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	868.700	
02	2.07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	49.329.800	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	45.999.800	
02	2.07	05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>260 Perkara</b>	<b>7.169.270.800</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>260 Perkara</b>	<b>7.053.811.800</b>	
02	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	186.473.800	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	77.126.300	

02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselesaian yang Terselesaikan	200 Perkara	198.663.600	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselesaian yang Terselesaikan	200 Perkara	198.663.600	
02	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.861.200	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.861.200	
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	250.299.300	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	250.299.300	
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	6.523.972.900	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	6.517.861.400	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yaitu dari 9 (Sembilan) Kecamatan. Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) usulan kegiatan yang masuk yang tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan;
2. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan yang terakomodir pada Forum SKPD Kota Makassar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan atau sebesar 100 persen;
3. Dari 33 (tiga puluh tiga) usulan kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) usulan merupakan hasil Musrenbang dan 6 (enam) usulan merupakan dari Pokok Pikiran DPRD; dan
4. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja;

Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2023 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar sebagaimana disajikan pada tabel 2.7 sesuai format Formulir T-C.32 berikut :

**Tabel 2.7 (Format T-C.32)**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023 Kota Makassar**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl Barukang No127 Kelurahan Gusung , Kecamatan Ujung Tanah	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	2 angkatan	Terakomodir 10 orang
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jl Barukang 127 Kelurahan Gusung,	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	3 angkatan	Terakomodir 30 orang

	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kecamatan Ujung Tanah			
3	Perluasan Kesempatan Kerja	Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan	50 orang	Terakomodir 20 orang
4	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Bandang IV No. 2 Kelurahan Parang, Kecamatan Bontoala	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelasan/Perbengkelan "Welding"	20 orang	Terakomodir 10 orang
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Bandang IV No. 2 Kelurahan Parang, Kecamatan Bontoala	Jumlah Peserta Pelatihan Service AC dan Alat Listrik Lainnya	20 orang	Terakomodir 15 orang
6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	35 orang	Terakomodir 5 orang
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	19 orang	Terakomodir 20 orang
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jl. Toddopuli Raya No. 100 RT.01 RW.09, Kelurahan Paropo,	Jumlah Peserta Pelatihan Service AC dan Alat Listrik Lainnya	20 orang	Terakomodir 10 orang

	berdasarkan Klaster Kompetensi	Kecamatan Panakkukang			
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Sabutung Timur No. 200 Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah	Jumlah Peserta Pelatihan Komputer dan Aplikasi	50 orang	Terakomodir 50 orang
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pulau Barrang Lompo RT 04 RW 02, Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar	5 orang	Terakomodir 5 orang
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Garuda Buntu No. 79 RT. 7 RW. 02 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso	Jumlah Peserta Pelatihan Sablon Baju	15 orang	Terakomodir 15 orang
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Cendrawasih Lorong 31 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso	Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga/Masakan/Pengolahan Makanan/Kuliner	10 orang	Terakomodir 10 orang
13	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Rappocini Raya Lr. 9 (Depan Kost Josua) Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar (H.IRWAN DJAFAR,	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar		Terakomodir 10 orang



		SE/FRAKSI NASDEM)			
14	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Manunggal 31 No. 13 RT 05/RW 01 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (BUDI HASTUTI/ FRAKSI GERINDRA)	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan		Terakomodir 10 orang
15	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Bangkala 2 No. 43, Kota Makassar (AZWAR, ST/FRAKSI PKS)	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar		Terakomodir 10 orang
16	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Bangkala 2 No. 43, Kota Makassar (AZWAR, ST/FRAKSI PKS)	Jumlah Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan		Terakomodir 10 orang

## BAB III

# Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2024.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 serta mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total 55 subkegiatan, terdapat 32 subkegiatan (53,33%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 7 subkegiatan (11,67%) mengalami penambahan anggaran dan 21 subkegiatan (35,00%) mengalami pengurangan. Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 pagu indikatif sebesar Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh

puluh rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja pagu indikatif menjadi sebesar Rp. Rp.23.530.012.761,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.657.361.109,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).

Adapun rincian Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Jumlah Pada DPA Pokok	Tidak Mengalami Perubahan	Mengalami Penambahan Pagu	Mengalami Pengurangan Anggaran
1	Program	5	1	2	2
2	Kegiatan	20	6	9	5
3	Sub Kegiatan	55	35	13	11

Adapun Rincian Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai Format I.I berikut:

**TABEL 3.2 (FORMAT I.I)**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**KOTA MAKASSAR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)		Tahun Rencana 2024									Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)					
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02		<b>URUSAN WAJIB</b>													
02	2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										24.187.373.870	23.530.012.761	(657.361.109)	
02	2.07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar	Kota Makassar	90,00 Persen	90,00 Persen	10.406.337.920	11.420.696.861	1.014.358.941	Disnaker		
				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			100,00 Persen	100,00 Persen						
				Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			90,00 Persen	90,00 Persen						
02	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	131.310.300	71.310.300	(60.000.000)	Disnaker		
02	2.07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	109.159.000	49.159.000	(60.000.000)	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.377.000	5.377.000	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.400	3.899.400	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.429.800	2.429.800	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.769.800	1.769.800	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Dokumen	4 Dokumen	5.286.300	5.286.300	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2 Dokumen	3.389.000	3.389.000	0,00	Disnaker	
02	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	36 Dokumen	36 Dokumen	7.328.002.636	8.560.610.161	1.232.607.525	Disnaker	
02	2.07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	61 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	6.882.537.436	8.115.144.961	1.232.607.525	Disnaker	
02	2.07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	265.320.000	265.320.000	0,00	Disnaker	

02	2.07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	144.145.200	144.145.200	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Laporan	0 Laporan	36.000.000	36.000.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>181.681.200</b>	<b>126.524.400</b>	<b>(55.156.800)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	82.735.200	27.578.400	(55.156.800)	Disnaker
02	2.07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	98.946.000	98.946.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>332.946.000</b>	<b>332.946.000</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar	Kota Makassar	- Paket	- Paket	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	98.946.000	98.946.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Orang	12 Orang	234.000.000	234.000.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.05	0010	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	0	0	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>902.382.900</b>	<b>746.382.900</b>	<b>(156.000.000)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Paket	1 Paket	13.312.800	13.312.800	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Paket	5 Paket	75.977.200	75.977.200	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Paket	2 Paket	76.827.300	76.827.300	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Paket	2 Paket	22.665.600	22.665.600	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000	26.100.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	483.500.000	483.500.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	204.000.000	48.000.000	(156.000.000)	Disnaker

02	2.07	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>25 Unit</b>	<b>25 Unit</b>	<b>356.233.000</b>	<b>356.245.000</b>	<b>12.000</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	16 Unit	16 Unit	226.000.000	200.000.000	(26.000.000)	Disnaker
02	2.07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	9 Unit	9 Unit	130.233.000	156.245.000	26.012.000	Disnaker
02	2.07	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	0 Unit	0	0	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>732.942.884</b>	<b>792.054.500</b>	<b>59.111.616</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	158.313.600	158.313.600	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	337.331.684	296.443.300	(40.888.384)	Disnaker
02	2.07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	237.297.600	337.297.600	100.000.000	Disnaker
02	2.07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>74 Unit</b>	<b>74 Unit</b>	<b>440.839.000</b>	<b>434.623.600</b>	<b>(6.215.400)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	44.380.000	44.380.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	Kota Makassar	17 Unit	17 Unit	254.173.000	247.957.600	(6.215.400)	Disnaker
02	2.07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	55 Unit	55 Unit	36.950.000	36.950.000	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	0 Unit	0	0	0,00	Disnaker
02	2.07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	105.336.000	105.336.000	0,00	Disnaker
02	2.07	02			<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>93,55 Persen</b>	<b>93,55 Persen</b>	<b>149.040.400</b>	<b>149.040.400</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	02	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>149.040.400</b>	<b>149.040.400</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	111.507.200	111.507.200	0,00	Disnaker
02	2.07	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	Kota Makassar	50 Perusahaan	50 Perusahaan	37.533.200	37.533.200	0,00	Disnaker
02	2.07	03			<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>1,03 Persen</b>	<b>1,03 Persen</b>	<b>3.203.613.800</b>	<b>3.152.283.800</b>	<b>(51.330.000)</b>	<b>Disnaker</b>
						<b>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan</b>	<b>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan</b>			<b>22,00 Persen</b>	<b>22,00 Persen</b>				
										<b>1.190 Orang</b>	<b>1.190 Orang</b>				
02	2.07	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>240 Orang</b>	<b>240 Orang</b>	<b>1.132.128.300</b>	<b>1.084.128.300</b>	<b>(48.000.000)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Makassar	Kota Makassar	240 Orang	240 Orang	1.123.615.300	1.075.615.300	(48.000.000)	Disnaker

02	2.07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Makassar	Kota Makassar	50 Lembaga	50 Lembaga	8.513.000	8.513.000	0,00	Disnaker
02	2.07	03	2.02		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>80 Lembaga</b>	<b>80 Lembaga</b>	<b>34.813.400</b>	<b>34.813.400</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	80 Lembaga	80 Lembaga	34.813.400	34.813.400	0,00	Disnaker
02	2.07	03	2.03		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>			<b>12 Perizinan</b>	<b>12 Perizinan</b>	<b>214.774.300</b>	<b>214.774.300</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Perizinan	12 Perizinan	214.774.300	214.774.300	0,00	Disnaker
02	2.07	03	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>120 Perusahaan</b>	<b>120 Perusahaan</b>	<b>399.285.300</b>	<b>399.285.300</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	Kota Makassar	120 Perusahaan	120 Perusahaan	399.285.300	399.285.300	0,00	Disnaker
02	2.07	03	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1.422.612.500</b>	<b>1.419.282.500</b>	<b>(3.330.000)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.422.612.500	1.419.282.500	(3.330.000)	Disnaker
02	2.07	04			<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>65,00 Persen</b>	<b>65,00 Persen</b>	<b>2.389.181.350</b>	<b>1.706.286.600</b>	<b>(682.894.750)</b>	<b>Disnaker</b>
						<b>Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru</b>	<b>Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru</b>			<b>9.555 Peluang Kerja</b>	<b>9.555 Peluang Kerja</b>				
02	2.07	04	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan</b>	<b>Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>3.713 Orang</b>	<b>3.713 Orang</b>	<b>1.636.284.150</b>	<b>1.338.616.600</b>	<b>(297.667.550)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Makassar	Kota Makassar	- Orang	- Orang	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Makassar	Kota Makassar	3.500 Orang	3.500 Orang	144.946.400	142.778.400	(2.168.000)	Disnaker
02	2.07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Makassar	Kota Makassar	30 Orang	30 Orang	235.120.000	205.247.600	(29.872.400)	Disnaker
02	2.07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	183 Orang	183 Orang	1.256.217.750	990.590.600	(265.627.150)	Disnaker
02	2.07	04	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>6 Lembaga</b>	<b>41.499.200</b>	<b>41.499.200</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>

02	2.07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	Kota Makassar	6 Lembaga	6 Lembaga	41.499.200	41.499.200	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Lembaga	0 Lembaga	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>8.000 Orang</b>	<b>8.000 Orang</b>	<b>489.322.000</b>	<b>104.094.800</b>	<b>(385.227.200)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	60.328.000	60.328.000	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	Kota Makassar	8.000 Orang	8.000 Orang	43.766.800	43.766.800	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	500 Orang	500 Orang	385.227.200	-	(385.227.200)	Disnaker
02	2.07	04	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>40 Orang</b>	<b>40 Orang</b>	<b>222.076.000</b>	<b>222.076.000</b>	<b>0,00</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	-	-	0,00	Disnaker
02	2.07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Orang	40 Orang	222.076.000	222.076.000	0,00	Disnaker
02	2.07	05			<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>38,50 Persen</b>	<b>38,50 Persen</b>	<b>8.039.200.400</b>	<b>7.101.705.100</b>	<b>(937.495.300)</b>	<b>Disnaker</b>
						<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun</b>	<b>Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun</b>			<b>3,66 Persen</b>	<b>3,66 Persen</b>				
						<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>	<b>Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)</b>			<b>79,00 Persen</b>	<b>79,00 Persen</b>				
02	2.07	05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>105 Perusahaan</b>	<b>105 Perusahaan</b>	<b>51.223.300</b>	<b>47.893.300</b>	<b>(3.330.000)</b>	<b>Disnaker</b>
02	2.07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Perusahaan	100 Perusahaan	1.024.800	1.024.800	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Perusahaan	5 Perusahaan	868.700	868.700	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	49.329.800	45.999.800	(3.330.000)	Disnaker



02	2.07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	260 Perkara	260 Perkara	7.987.977.100	7.053.811.800	(934.165.300)	Disnaker
02	2.07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	Kota Makassar	60 Perkara	60 Perkara	77.126.300	77.126.300	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Perkara	200 Perkara	198.663.600	198.663.600	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.861.200	9.861.200	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Lembaga	2 Lembaga	250.299.300	250.299.300	0,00	Disnaker
02	2.07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Kota Makassar	35.782 Orang	35.782 Orang	7.452.026.700	6.517.861.400	(934.165.300)	Disnaker

# BAB IV

## Penutup

### 4.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2024. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Kota Makassar tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

## 4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2024, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

## 4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.

Makassar, Agustus 2024  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA MAKASSAR

**NIELMA PALAMBA, SH. M.AP**  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc  
NIP : 19651210 199112 2 006

# LAMPIRAN